

BAB II
PROFIL PERUSAHAAN
DAN
TENTANG KABUPATEN PURWAKARTA

2.1 Sekilas Tentang Kabupaten Purwakarta

2.1.1 Letak Geografi

Daerah Purwakarta berada pada posisi geografik antara 6°25-6°45 LS dan 107°30-107°40 BT. Dengan luas wilayah 971,72 km dengan jumlah penduduk 782,362 jiwa (sensus penduduk tahun 2005). Kabupaten Purwakarta terletak di provinsi Jawa Barat, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang di bagian utara, dan kabupaten Bandung di bagian selatan. Dari segi transportasi dan komunikasi, letak geografis Kabupaten Purwakarta cukup strategis, karena dilalui jalan raya provinsi, jalan tol, dan jalan kereta api. Jalan-jalan itu menghubungkan Purwakarta dengan Bandung ibukota Provinsi Jawa Barat, Jakarta ibukota negara dan Cirebon.

2.1.2 Asal Kata

Purwakarta berasal dari kata *Purwa* yang artinya *permulaan* dan *karta* yang artinya *ramai* atau *hidup*. Jadi, Purwakarta memiliki arti *mulai ramai* atau *mulai hidup*.

2.1.3 Pemerintah dan Kondisi Politik

2.1.3.1 Organisasi Pemerintah

Berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah. Mulai 1 Januari 2001 Kabupaten Purwakarta melaksanakan Otda (Otonomi Daerah). Sejalan dengan hal itu, dalam sidang paripurna DPRD tanggal 18 Juni 2002, disetujui dan disahkan 17 RAPERDA menjadi PERDA.

- VISI : Purwakarta Berkarakter
- MISI :
 1. Mengembangkan pembangunan berbasis religi dan kearifan lokal, yang berorientasi pada keunggulan pendidikan, kesehatan, pertanian, industri, perdagangan, dan jasa.
 2. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal dan berorientasi pada semangat perubahan kompetisi global.
 3. Meningkatkan keutuhan lingkungan, baik hulu maupun hilir, fisik maupun sosial.
 4. Mengembangkan struktur pemerintahan yang efektif, yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik, mengembangkan potensi kewirausahaan, birokrasi yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.

2.1.3.2 Strategi Pembangunan Daerah

Dalam rangka oprasionalisasi dan membumikan visi pembangunan : Purwakarta Berkarakter, pada tataran pragmatis operasional ditempuh melalui **“SALAPAN LENGKAH NGAWANGUN NAGRI RAHARJA”**, sebagai strategi, target, sekaligus kerangka kerja pelaksanaan pembangunan Purwakarta tahun 2008-2013.

1. Pendidikan Gratis Sampai Tingkat SLTA Bagi Masyarakat Miskin.

Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan, hal tersebut sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan

kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pendidikan merupakan salah satu pilar terpenting dalam meningkatkan kualitas manusia. Pada saat ini pendidikan merupakan syarat dalam meningkatkan kualitas SDM, dimana pendidikan berperan sebagai salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Sehingga oleh karenanya pembangunan pendidikan di daerah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, termasuk terhadap penduduk yang tidak beruntung pada sisi ekonomi atau berkategori miskin. Tanpa adanya pola terobosan untuk menjamin masyarakat miskin dapat memperoleh pendidikan secara mudah dan gratis, peningkatan pendidikan secara merata di Kabupaten Purwakarta hanya akan tetap menjadi wacana. Kesenjangan tingkat pendidikan, seperti antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara penduduk di perkotaan dan penduduk di perdesaan menjadi penghambat tersendiri dalam mewujudkan tingkat pemerataan pendidikan masyarakat. Faktor ekonomi merupakan alasan utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya sekolah maupun karena harus bekerja untuk ikut membantu ekonomi keluarga. Hal tersebut berdampak pada tingginya kesenjangan tingkat pendidikan antara penduduk miskin dengan penduduk kaya. Masyarakat miskin masih menilai bahwa pendidikan masih terlalu mahal dan belum memberikan manfaat yang signifikan atau sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Atas dasar kenyataan tersebut, langkah strategis guna melindungi dan memberikan *treatment* serta perhatian yang lebih terhadap kondisi pendidikan masyarakat miskin di Kabupaten Purwakarta, yang melalui pendidikan gratis sampai dengan tingkat SLTA bagi penduduk miskin. Hal itu tentunya dalam rangka mewujudkan masyarakat

Purwakarta cageur, bageurr, bener, tur pinter secara merata, pada semua lapisan masyarakat. Diharapkan dengan pola langkah yang demikian, permasalahan masih cukup rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Purwakarta dapat tertangani dengan cepat dan searah, sehingga mampu mendorong peningkatan signifikan kualitas SDM Purwakarta secara totalitas.

2. Pembebasan Biaya Pembelian Buku Sekolah dan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Baca Tulis Al Quran Bagi Siswa TK, SD, SLTP, dan SLTA yang Beragama Islam.

Biaya pendidikan di Kabupaten Purwakarta sampai dengan saat ini dinilai oleh beberapa pihak masyarakat masih dirasa sangat memberatkan. Meskipun SPP sekolah, terutama Sekolah Dasar (SD) sudah sejak tahun 2004 secara resmi melalui dukungan APBD telah dihapuskan oleh Pemerintah Daerah. Tetapi pada kenyataannya masyarakat masih harus dibebani oleh pengeluaran-pengeluaran lain di luar iuran sekolah, salah satunya berupa pembelian buku sekolah. Buku-buku mata pelajaran merupakan komponen penting unsur pengajaran. Bahan bacaan yang berkualitas mutlak. Hanya saja untuk memperoleh buku-buku bahan bacaan yang berkualitas pada semua jenjang tingkatan sekolah membutuhkan biaya yang cukup mahal, dan itu semua dibebankan pada masyarakat.

Guna menanggulangi permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis agar peserta didik, mulai dari tingkatan TK, SD, SLTP, dan SLTA, baik di perkotaan ataupun di pedesaan secara merata dapat memperoleh buku mata pelajaran secara mudah, merata dan seragam. Langkah strategisnya adalah *pemberian buku secara gratis kepada siswa sekolah pada semua jenjang tingkatan pendidikan, mulai dari TK, SD, SLTP hingga SLTA.*

Kemudian guna mewujudkan masyarakat Purwakarta yang “Bener”, secara normatif diperlukan pola pengembangan kehidupan keagamaan yang dibangun sejak dini. Penanaman nilai-nilai agama sebagai kekuatan lokal kepada masyarakat terutama anak usia sekolah sejak dini harus kita lakukan. Pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran agama di kalangan peserta didik sampai dengan saat ini masih dinilai belum memuaskan. Hal ini merupakan tantangan bagi pelaksanaan pendidikan keagamaan di masa yang akan datang. Kendala utama adalah kurangnya jumlah dan rendahnya mutu pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya, terbatasnya sarana dan prasarana, serta minimnya fasilitas pendukung keagamaan. Pada sisi lain, derasnya arus globalisasi terutama melalui media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku anak didik yang cenderung ke arah negatif, yang seharusnya dapat dicegah atau dikurangi dengan pemahaman dan penghayatan agama.

Atas dasar hal tersebut, mengingat sebagian besar penduduk Purwakarta beragama islam, maka dipandang perlu untuk dikembangkan dan diterapkan kurikulum baca tulis Al Qur’an bagi siswa sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA yang beragama Islam, agar transformasi nilai-nilai agama dapat berjalan secara terus menerus, berjenjang dan berlangsung sejak dini. Dari strategi ini diharapkan dapat terbentuk siswa didik yang cerdas, siap pakai dan *berakhlakul karimah*.

3. Pelayanan KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Gratis Bagi Seluruh Masyarakat Dengan Sistem Pelayanan di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Optimalisasi peran desa dan kelurahan pada masa-masa mendatang harus terus didorong. Objek-objek layanan masyarakat yang selama ini masih dilakukan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tingkat Kabupaten, guna lebih mendekatkan dengan masyarakat sudah selayaknya diserahkan kepada Desa dan Kelurahan sebagai ujung tombak Otonomi Daerah. *Pola Otonomisasi desa dan Kelurahan* yang selama

ini hanya baru berupa wacana topis, pada terutama menyangkut objek-objek layanan langsung masyarakat. Salah satu objek layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yaitu layanan administrasi kependudukan dalam bentuk layanan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan layanan kependudukan lainnya.

Layanan-layanan administrasi kependudukan tersebut merupakan hak masyarakat, pemerintah atau penyedia layanan diwajibkan untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dengan dukungan APBD dan dukungan semua pihak, pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengambil langkah memberikan pelayanan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan layanan kependudukan lainnya secara Gratis Penuh bagi seluruh masyarakat Purwakarta, dengan pusat pelayanan di desa dan Kelurahan. Perangkat-perangkat guna mendukung upaya ke arah tersebut, baik aturan (berupa kebijakan), saran (berupa alat penunjang), maupun sumber daya manusia (aparatur), akan disiapkan segera.

4. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap Di Seluruh Kecamatan.

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kesehatan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Meskipun secara umum dari waktu ke waktu kualitas kesehatan masyarakat Purwakarta berdasarkan data kuantitatif telah menunjukkan angka yang meningkat, tetapi disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan antar daerah perkotaan-perdesaan masih cukup tinggi. Angka kematian bayi dan angka kematian balita pada golongan masyarakat miskin hampir empat kali lebih tinggi dari golongan masyarakat kaya. Selain itu, angka kematian bayi dan angka

kematian ibu melahirkan lebih tinggi di daerah pedesaan dan pada penduduk dengan tingkat pendidikan rendah. Persentase anak balita yang berstatus gizi kurang dan buruk di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih dan cakupan imunisasi pada golongan miskin lebih rendah dibandingkan dengan golongan masyarakat kaya.

Rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan faktor terbesarnya disebabkan karena masih belum mencukupinya jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada dibandingkan dengan jumlah penduduk dan persebarannya. Sehingga guna lebih mendekatkan layanan kesehatan masyarakat, Puskesmas-puskesmas yang telah ada sekarang, yang tersebar di 17 Kecamatan di Kabupaten Purwakarta, pada lima tahun kedepan secara bertahap harus dorong untuk mampu memberikan layanan rawat inap. Distribusikan dokter, perawat, bidan, alat kesehatan, obat-obatan dan sarana prasarana yang terbesar di Kecamatan-Kecamatan di seluruh Wilayah Kabupaten Purwakarta.

5. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Pegawai Melalui Insentif Kehadiran, Serta Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa, Bamusdes LPM, Linmas Hansip, Kadus, RW, RT, DKM, dan Guru Ngaji Melalui Otonomi Desa dan Kelurahan.

Fungsi utama pemerintahan adalah fungsi pengaturan (*regulation*) dan fungsi pelayanan (*services*). Tujuan pembentukan pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Hakekat pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan serta kreatifitasnya dalam mencapai kemajuan bersama.

Pemerintah Daerah di masa yang akan datang, diharapkan pada permasalahan internal dan eksternal. Dari sisi eksternal, pemerintah daerah akan dihadapkan pada dampak globalisasi yang sarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal, tenaga kerja, dan budaya. Di sisi internal, pemerintah daerah akan menghadapi kondisi masyarakat yang semakin cerdas (*knowledge based society*) dan masyarakat yang semakin banyak tuntutan (*demanding community*). Upaya untuk mewujudkan proses penyelenggaraan pemerintah yang baik, antara lain dapat tercermin dari indikator : keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif. Selain hal tersebut, faktor yang sering terlupakan dan luput dari perhatian semua pihak yaitu permasalahan *Rewards* (penghargaan), *Remuneration* (pengajian) dan *Punishment* (penghukuman).

Tuntutan terbentuknya aparatur yang profesional dengan tingkat kinerja yang tinggi, tentunya harus diikuti dengan *Rewards* (penghargaan) dan *Remuneration* (pengajian/pengupahan) yang memadai. Pada lima tahun mendatang, dalam rangka meningkatkan motivasi kerja, kami akan mengambil langkah untuk memberikan ***insentif dalam bentuk tunjangan kepada pegawai dan guru*** di Kabupaten Purwakarta, pada semua jenjang pemerintahan daerah, atas dasar tingkat kehadiran dan kinerja masing-masing pegawai dan guru. Diharapkan melalui langkah ini akan terbangun motivasi kerja yang positif, sehingga peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.

Selain perhatian dalam bentuk pemberian insentif kepada pegawai Pemerintahan Kabupaten, elemen lain sebagai supporting agen pembangunan di Purwakarta yang perlu di perhatikan tingkat kesejahteraannya *yaitu Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip, Kadus, RW, RT, DKM, dan Guru Ngaji*. Guna menjamin kehidupan dan penghidupan para Kepala Desa, Aparatur Desa, Bamusdes, LPM, Linmas/Hansip, Kudus, RW, RT, DKM, dan Guru Ngaji, maka perlu diberikan insentif penghasilan yang wajar. Anggaran biaya untuk isentif akan teralokasikan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kelurahan melalui optimalisasi dan pengembangan Otonomisasi Desa dan Kelurahan.

6. Pengembangan dan Pelebaran Jalan Hotmix Serta Listrik Sampai Pelosok Pedesaan, Membuat/Mengoptimalkan Jalur Tembus Cikao Bandung-Babakancikao, Kiarapedes-cibatu, Pasawahan –Cibatu, Pasawahan-pondoksalam, Paswahan-Purwakarta, Pondoksalam-Bojong, Wanayasa-Pondoksalam, Bojong-Darangan, Campaka-Cibatu-Bungursari, Membuka Pintu Tol Sawit,Serta Pelebaran Jalan Sawit-Wanayasa.

Pembangunan infrastruktur adalah bagian integral dari keseluruhan proses pembangunan. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun orang. Infrastruktur lainnya seperti sarana listrik terkait dengan upaya modernisasi dan penyediaan merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor ekonomi masyarakat.

Sarana jalan merupakan modal transportasi utama yang berperan penting dalam mendukung pembangunan daerah serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri. Infrastruktur jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan

mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antar perkotaan dan antar pedesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah. Fungsi jaringan jalan sebagai salah satu komponen prasarana transportasi sudah saatnya diletakan pada posisi prioritas untuk segera mendapatkan penanganan. Daerah-daerah perdesaan di Kabupaten Purwakarta yang selama ini masih memiliki sarana jalan berkondisi buruk , pada kurung waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 akan ditingkatkan statusnya menjadi jalan beraspal hotmix. Area-area di Kabupaten Purwakarta yang selama ini masih terputus dan belum terkoneksi, pada 5 tahun ke depan akan diupayakan untuk dilakukan pembuatan jalur tembus. Langkah terobosan ini diambil, karena masih banyak ruas-ruas jalan, yang sebetulnya memiliki nilai ekonomi tinggi tetapi belum terhubung dengan baik satu sama lain. Ruas-ruas jalan tersebut seperti misalnya : **Jalur Tembus Cikao Bandung-Babakancikao, Kiarapedes-Cibatu, Pasawahan-Cibatu, Pasawahan-Pondoksalam, Pasawahan-Purwakarta, Pondoksalam-Bojong, Wanayasa-Pondosalam, Bojong-Darangdan, Campaka-Cibatu-Bungursari.**

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah darisektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan mengajukan permohonan kepada PT.jasa Marga Persero sebagai BUMN pengelola Jalan Tol Purbaleunyi agar dapat membuka Pintu Tol Sawit. Upaya tersebut dimaksudkan agar arus wisatawan dari Jakarta dan Bandung dapat mengarah langsung ke wilayah Kecamatan Bojong dan Wanayasa, mengingat di kedua Kecamatan tersebut selain didukung dengan suhu yang sejuk, juga terdapa area wisata agro, alam, budaya, dan wisata air (Situ). Guna mendukung perkembangan pariwisata dan memperlancar transportasi dari Pintu Tol Sawit ke Wanayasa dan Bojong, langkah pertama yang

akan dilakukan yaitu memperlebar dan meningkatkan kualitas jalan Ruas Bojong-Wanayasa, sehingga cukup representatif untuk dilalui arus wisatawan.

7. Pengembangan Air Bersih dan Irigasi Perdesaan Secara Menyeluruh dan Mengoptimalkan Sungai Cihorang Untuk Irigasi Perairan Pondoksalam-Pasawahan, Sungai Cikao Untuk Irigasi Perairan Bojong-Darangdan-Jatiluhur, dan Sungai Cimunjul Untuk Irigasi Cilamaya Untuk Irigasi Perairan Purwakarta-Babakancikao. Pengembangan Irigasi Cimalaya Untuk Pertanian Kiarapedes-Wanayasa-Cibatu-Campaka-Bungursari, Serta Mengoptimalkan Masyarakat Maniis, Plered, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur Dengan Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan, dan Pariwisata.

Air merupakan kebutuhan pokok manusia untuk melangsungkan kehidupan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan di bidang sumber daya air pada dasarnya adalah upaya untuk memberikan akses secara adil kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan air agar mampu berkehidupan sehat, bersih, dan produktif.

Meningkatnya ancaman terhadap keberlanjutan daya dukung sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah. Kerusakan lingkungan yang semakin luas akibat kerusakan hutan secara signifikan telah menyebabkan penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam menahan dan menyimpan air. Hal yang memperhatikan adalah indikasi terjadinya proses percepatan laju kerusakan daerah tangkapan air. Oleh karenanya Pemerintah Daerah akan mengambil langkah untuk menyelamatkan daerah hulu, daerah aliran sungai, daerah sekitar aliran serta daerah resapan untuk di jaga tingkat kelestariannya.

Selanjutnya berkaitan dengan pengembangan sumber air untuk irigasi guna memenuhi kebutuhan pertanian, langkah strategis yang akan dilakukan yaitu melalui optimalisasi

peran dan fungsi sungai dan danau di Kabupaten Purwakarta yang telah ada. Sungai Ciherang akan diarahkan untuk irigasi Perairan Pondoksalam-Pasawahan, Sungai Cikao untuk Irigasi Perairan Bojong-Darangdan-Jatiluhur, dan Sungai Cimunjul untuk Irigasi Perairan Purwakarta-Babakancikao. Kemudian menyangkut pengembangan irigasi, irigasi Cimalaya akan dikembangkan untuk Pertanian Kiarapedes-Wanayasa-Cibatu-Campaka-Bungursari, Bendungan Cirata dan Jatiluhur akan diarahkan untuk Pertanian Masyarakat Maniis, Plered, Tegalwaru, Sukatani, Sukasari, dan Jatiluhur melalui Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan dan Pariwisata.

Pola Integrasi Kehutanan, Pengairan, Perikanan, Pertanian, Peternakan, dan Pariwisata yang dimaksudkan merupakan adopsi tata nilai simbiosis mutualisme antar sektor dan antar bidang pembangunan. Pemikiran sederhananya adalah dengan menyatukan peternakan, perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengairan sebagai bagian dari komponen sistem yang tersimbiosis mutualisme satu dengan yang lain serta terhubung secara sistemik atau dengan yang lain.

8. Pengembangan Kawasan Terpadu Kecamatan Bungursari, Pengembangan Tata Kota dan Tata Bangunan Yang Beridentitas Purwakarta, Renovasi Bangunan Tua, Pengembangan Halaman Stasiun, Penyempurnaan Situ Buleud, Penataan Alun-Alun, Integrasi Bangunan Pemerintahan, Serta Pemberian Perlindungan Yang Menyeluruh Terhadap Keberadaan dan Kualitas Pedagang Serta Pasar Tradisional.

Kecamatan Bungursari, karena letaknya cukup strategis yaitu sebagai pintu gerbang Purwakarta, perlu mendapat *treatment* perhatian yang lebih. Pada aspek ekonomi, wilayah Kecamatan Bungursari dapat mendatangkan potensi untuk dikembangkan menjadi pusat area industri dan perdagangan/jasa. Guna menuju ke arah tersebut,

infrastruktur dan tata ruang wilayahnya perlu ditata dengan baik, agar wilayah bungursari dapat tampil sebagai area yang unik, berkarakter dan khas. Untuk hal tersebut, tampil wilayah mulai dari kondisi jalan, taman kota, bentuk bangunan pemerintahan, bangunan perumahan masyarakat, serta publik, kehidupan sosial masyarakat dan aspek-aspek lainnya ke depan akan ditata, agar dapat menunjukkan karakter dan budaya lokal Purwakarta (*identity factor*).

Pada aspek tata ruang kota Kabupaten dan tata bangunan gedung pemerintahan dan masyarakat akan diarahkan agar dapat menunjukkan Karakter Purwakarta. Bangunan-bangunan tua yang selama ini ada, akan ditata dan diperindah. Halaman Stasiun Purwakarta sebagai warisan sejarah, ke depan akan dikembalikan kepada kondisi semula, sehingga dapat menunjukkan kondisi tempo dulu Purwakarta. Selanjutnya aspek-aspek wilayah lainnya seperti Kawasan Situ Buleud, Alun-Alun dan Bangunan Pemerintahan Daerah akan ditata, sesuai dengan karakter lokal Purwakarta.

Dalam rangka mengembangkan sektor perdagangan, perlindungan terhadap pasar perlu terus dilakukan, terutama pasar-pasar tradisional yang tersebar di beberapa kecamatan. Pasar-pasar tradisional tersebut, ke depan akan dikembangkan dan di optimumkan peran dan fungsinya, terutama dalam rangka dinamisasi ekonomi perdesaan.

9. Pengembangan Investasi Dengan Menyiapkan Tanah Untuk Industri Dengan Sistem Sewa Yang Disiapkan Oleh Pemerintah Daerah.

Pada aspek letak, Kabupaten Purwakarta berada pada posisi pertemuan antara jalur Jakarta-Bandung dan Jalur Jakarta-Cirebon (Pantura). Berdasar pada aspek letak yang strategis tersebut, Purwakarta berpotensi untuk berkembang menjadi daerah industri. Guna menyiapkan dan menangkap peluang yang ada, Pemerintahan Daerah akan mengambil langkah untuk menyiapkan area/zona industri melalui sistem sewa kepada

Pemerintah Daerah. Melalui pola ini diharapkan dapat tercapai pola hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan investor, serta menjadi faktor penarik masuknya investasi ke wilayah Purwakarta (insentif investasi).

2.1.3.3 Kehidupan Masyarakat

Seperti pada umumnya masyarakat yang berdomisili di bagian tengah Jawa Barat. Pola kehidupan masyarakat Kabupaten Purwakarta didominasi oleh kultur budaya sunda. Sejalan dengan kebudayaan zaman yang ditandai oleh perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Masyarakat Kabupaten Purwakarta banyak dipengaruhi oleh budaya asing. Namun demikian, budaya masyarakat pada dasarnya tetap bernuansa budaya sunda dan budaya agama terutama agama islam.

2.2 Sejarah DISHUBPARPOSTEL

DISHUBPARPOSTEL (Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi) mulai diberlakukan pada bulan Januari 2009, yang terbentuk berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Purwakarta sebagai pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta, Nomor 5 tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Purwakarta. Dinas ini adalah gabungan dari 5 dinas yang ada di Kabupaten Purwakarta, yaitu dinas perhubungan, dinas kebudayaan, dinas pariwisata, dinas pos, dan dinas telekomunikasi. Masing – masing dinas mempunyai tugas pokoknya masing – masing.

2.3 VISI dan MISI

1. Visi

Menjadikan Purwakarta Tujuan Wisata Berkarakter Tahun 2014.

2. Misi

- a. Meningkatkan sistem pengendalian, sarana, prasarana dan fasilitas perhubungan, pos dan telekomunikasi yang handal dan terpadu.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan nilai – nilai budaya dan produk wisata.
- c. Meningkatkan pelayanan dan efektifitas sistem kerja aparatur.

2.4 Tugas DISHUBPARPOSTEL

Berdasarkan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta, adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah dibidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

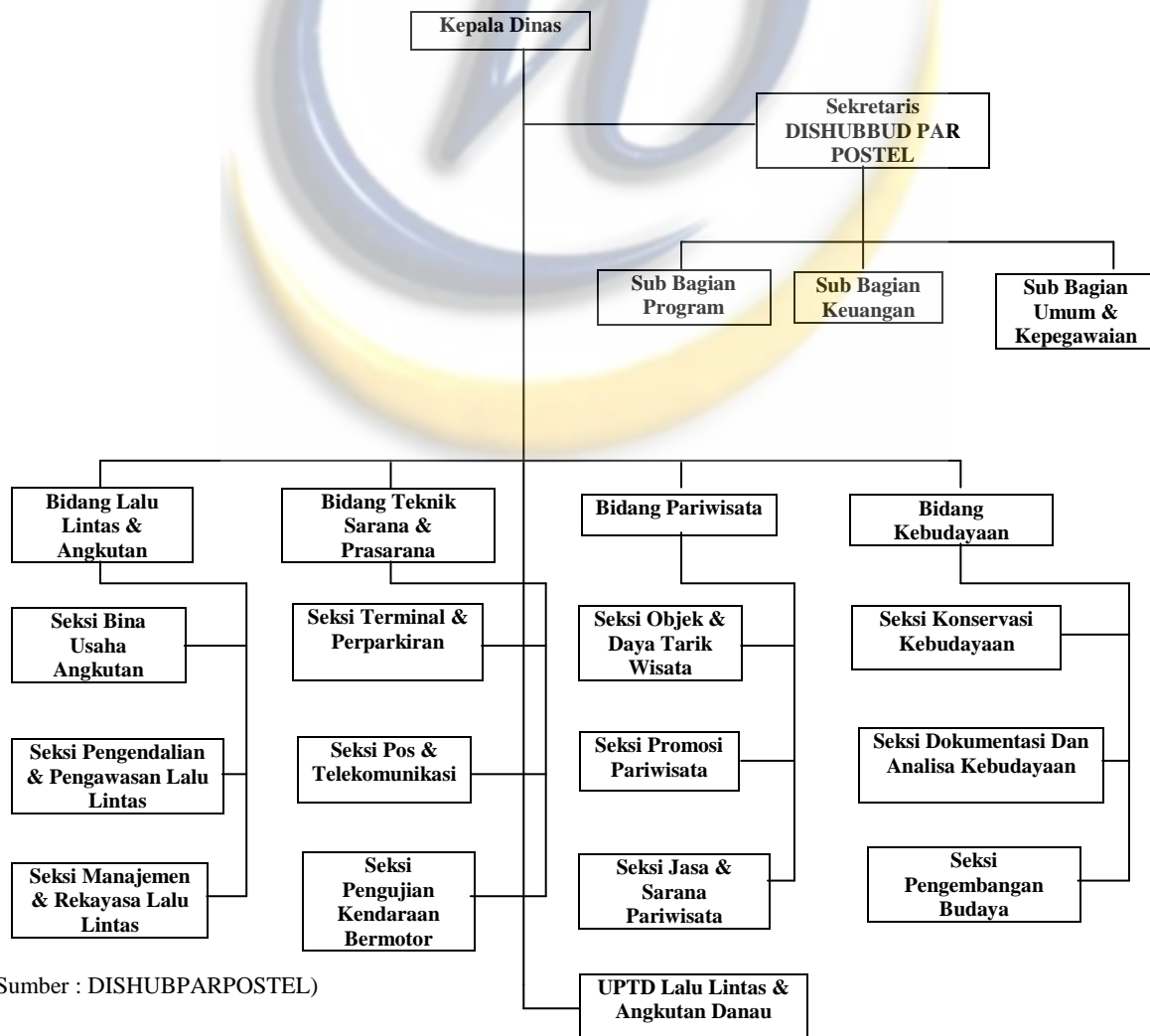
2.5 Fungsi DISHUBPARPOSTEL

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, kebudayaan, pariwisata, pos dan telekomunikasi.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lalu lintas dan angkutan, teknik sarana dan prasarana, pariwisata, dan kebudayaan.
4. Penyelenggaraak pembinaan ketatausahaan dinas.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.6 Susunan Kepengurusan

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta setelah terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Secara struktural Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Dinas, dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) orang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala Sub bagian dan Kepala Bidang, masing – masing dibantu oleh 3 (tiga) orang kepala Sub Bidang.

Tabel 2.1
Susunan kepengurusan



(Sumber : DISHUBPARPOSTEL)

2.7 Nilai-nilai Organisasi DISHUBPARPOSTEL

Nilai-nilai organisasi (instansi) pelaksanaan kinerja merupakan nilai dasar (filosofi) dalam melaksanakan seluruh aktifitas kedinasan (Tugas Pokok dan Fungsi) dan tugas pembantuan dalam bidang Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai Pancasila UUD 1945 serta nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai luhur tersebut, Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi Kabupaten Purwakarta dalam melaksanakan kinerja dinas, menetapkan nilai-nilai instansi organisasi :

1. Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Sebagai masyarakat yang beragama, beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai ini harus di jadikan landasan dari setiap langkah dan sikap hidup dan pedoman hidup berorganisasi.

2. Kejujuran

Nilai kejujuran merupakan kunci dari keberhasilan pembangunan, secara khusus di bidang Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, pos, dan Telekomunikasi, di tuntut nilai kejujuran, baik terhadap diri pribadi, organisasi dan masyarakat.

3. Keterbukaan

Menyingkapi arus informasi (perubahan) yang semakin kompleks, Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi sebagai *instansi public*, dituntut bersikap terbuka dalam setiap kebijakan, program atau kegiatan yang dilaksanakannya sebagai bentuk akuntabilitas terhadap masyarakat. Keterbukaan yang proposional dari Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan

Telekomunikasi akan memberikan nilai yang positif dalam rangka menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

4. Kekeluargaan

Dalam menjalankan aktifitas organisasi yang merupakan suatu kegiatan kolektif, nilai kekeluargaan akan bermakna terhadap keberhasilan organisasi. Nilai kekeluargaan ini, dalam implementasinya dapat dikembangkan secara luas dan nyata dalam hal gotong royong dan kesetiakawanan sosial masyarakat.

5. Kebersamaan

Melakukan koordinasi dengan dinas / instansi terkait dan melaksanakan kinerja, program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi organisasi secara kebersamaan dan harmonis serta menjunjung tinggi objektivitas, hal ini merupakan perwujudan kebersamaan dalam mencapai tujuan organisasi secara berdaya guna dan berhasil guna.

6. Keadilan

Keadilan dalam pelayanan di bidang Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan telekomunikasi mutlak diperlukan dalam rangka menjamin keseimbangan pemenuhan hak masyarakat.

7. Keratifitas

Memasuki eforia otonomi daerah sebagai suatu peluang dan juga dapat menjadi tantangan kinerja organisasi, seluruh aparat Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dituntut untuk mengembangkan kreatifitas demi terwujudnya berbagai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara bersama-sama.

8. Kemandirian

Core idea otonomi daerah adalah menetapkan masyarakat selaku subjek utama dalam pengelolaan pembangunan di berbagai sektor. Oleh karena itu, keberhasilan kinerja dibidang Perhubungan, kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan telekomunikasi harus ditandai dengan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sektor ini. Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi harus terus menerus menumbuhkan dan meningkatkan peran aktif pengelolaan pembangunan oleh masyarakat.

